

BAB I

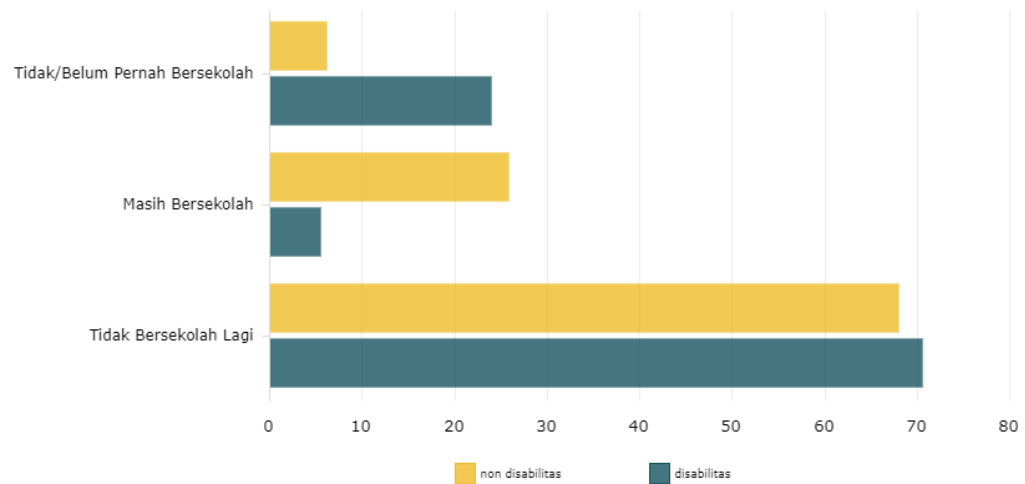
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya, perbedaan ini bisa terdapat pada fisik maupun psikis mereka (Dedy Kustawan, 2016, p. 16). Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 pasal 129 ayat (3) menetapkan 12 golongan anak berkebutuhan khusus yang nantinya berguna dalam mengelompokan mereka saat akan mengenyam pendidikan, 12 kelompok tersebut adalah anak- anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, autis, motoric yang terganggu, anak dengan riwayat nerkotika, dan lain sebagainya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Anak-anak tersebut selanjutnya diupayakan untuk dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak lainnya. Adapun data statistic terkait partisipasi ABK dalam bersekolah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Statistik Pendidikan Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah



Sumber : www.bps.go.id diakses pada 5 Maret 2020

Berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2018, persentasi penduduk usia 5 tahun ke atas terjadi ketimpangan partisipasi sekolah antara penyandang disabilitas dan yang bukan disabilitas. Penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48%. Persentase tersebut jauh dari penduduk yang bukan penyandang disabilitas, yaitu mencapai 25,83%. Penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali mencapai 23,91%. Adapun penduduk usia 5 tahun ke atas yang bukan disabilitas dan belum sekolah hanya 6,17%. Sementara itu, penyandang disabilitas yang tidak bersekolah lagi sebesar 70,62%.

Keberadaan ABK mempengaruhi Pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Pemerintah diharapkan mampu menyediakan sebuah layanan yang dapat mengakomodir kebutuhan ABK dalam bidang pendidikan sehingga hak pendidikan mereka dapat terpenuhi. Bentuk layanan tersebut adalah, adanya

Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Terpadu serta Sekolah Dasar Luar Biasa. Ketiga layanan pendidikan untuk ABK tersebut memiliki letak perbedaan pada kekhususan ABK yang diterima, dimana SLB disiapkan untuk pendidikan yang peserta didiknya seluruhnya adalah ABK yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kelainan yang dimiliki, kemudian SDLB merupakan sekolah dasar yang menampung bermacam-macam ABK, dan Sekolah terpadu yaitu sekolah umum yang memiliki siswa-siswi ABK namun kurikulum hingga proses belajar mengajar disama ratakan. Sekolah terpadu ini kemudian dikembangkan menjadi sekolah dengan pendidikan inklusif. Layanan pendidikan bagi ABK dalam hal ini adalah pendidikan inklusif merupakan hasil dari adanya tuntutan pemenuhan hak asasi anak berkebutuhan khusus yang mulai gencar digaungkan sejak tahun 1991 dengan adanya deklarasi '*Education for All*' (Herawati, 2016, pp. 1–2).

Pemerintah Indonesia sendiri pada tahun 1997 mulai menerapkan pendidikan inklusif di dunia pendidikan Indonesia. Program layanan pendidikan inklusif adalah wujud penyempurnaan dari sekolah terpadu yang dinilai tidak berkembang. Kemudian, pada tahun 1998 s.d 2001 Balitbang Dikbud melakukan uji coba penyelenggaraan pendidikan inklusif di 7 SD di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari Gunungkidul Yogyakarta. Hasil dari uji coba tersebut oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Indonesia (BUDIYANTO, 2017, p. 3). Hasil deklarasi '*Education for All*' juga menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi

Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa , peraturan ini menjelaskan bahwa:

“Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 juga memuat tentang tujuan pendidikan inklusif, adapun tujuan itu adalah:

1. Memberi kesempatan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan sesuai yang dibutuhkan.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang setara dan tidak diskriminatif

Berkaitan dengan peraturan tersebut, pada pasal 4 ayat 1, setiap daerah diwajibkan untuk memiliki masing-masing satu sekolah dari tingkatan dasar hingga menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan menerima ABK sebagai peserta didiknya.

Pendidikan inklusif atau inklusi dipandang sebagai proses di mana sekolah menyambut, menghargai, mendukung, dan memberdayakan semua siswa dalam lingkungan dan pengalaman bersama untuk tujuan mencapai tujuan pendidikan (Devecchi & Nevin, 2010, p. 6). Pendidikan inklusif seringkali disamakan dengan pendidikan luar biasa didalam masyarakat, padahal kedua hal tersebut adalah berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada penerimaan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran. Pendidikan inklusif berusaha untuk memberikan kesempatan ABK untuk bersosialisasi dengan lingkungan sehingga proses belajar mengajar berada ditengah-tengah anak-anak yang normal, sedangkan Sekolah Luar

Biasa seluruh peserta didiknya adalah ABK dan proses belajarnya terpisah dari anak-anak normal.

Penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan dengan melakukan adaptasi terhadap delapan standar nasional pendidikan, dalam mengaplikasi pelayanan pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus dan kelas-kelas inklusi harus tercipta suasana belajar yang kooperatif antara siswa normal dan siswa yang berkebutuhan khusus, sehingga dalam melakukan proses pembelajaran tidak menimbulkan perbedaan. Penyelenggaraannya didasarkan pada delapan standar nasional pendidikan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan :

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standara Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Pendidikan inklusif juga memiliki tujuan untuk mengintervensi ABK sedini mungkin sehingga ABK dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dengan mudah, hal yang dilakukan pemerintah dalam memberikan intervensi diantaranya:

- a. Meminimalisir keterbatasan pada keadaan tumbuh kembang ABK dan mengoptimalkan kesempatan ABK dalam kegiatan dengan lingkungan dengan normal
- b. Berusaha untuk mencegah kondisi yang memburuk pada perkembangan ABK yang tidak teratur sehingga ABK bisa lebih terarah dan memiliki kemampuan lebih,
- c. Meminimalisir munculnya keterbatasan-keterbatasan lain.

Isbandi Rukminto Adi memaknai intervensi sosial sebagai perubahan yang dilakukan secara terencana, dilakukan oleh pihak yang sering disebut *agent of change* di wilayah kabupaten hingga Negara bahkan global, lebih lanjut didalam sebuah intervensi terdapat kegiatan *healing* yang dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat ini baik yang berkaitan dengan kesulitan emosional ataupun masalah yang situasional (Isbandi Rukminto Adi, 2008, p. 49).

Mengutip melalui kompasiana.com, sebagai bagian dari *steakholder* pendidikan, peran yang dapat dilakukan oleh seorang guru sebagai salah satu *change agent* dari intervensi sosial dalam mewujudkan sekolah inklusi, terutama pada penanganan anak berkebutuhan khusus antara lain :

1. Layanan prevensi, layanan ini merupakan kegiatan pencegahan yang dilakukan agar ABK tidak mengalami hambatan yang berarti pada saat proses belajar mengajar.
2. Layanan intervensi, yakni kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan hambatan belajar yang dihadapi ABK sehingga mereka bisa berkembang optimal.

3. Layanan Kompensatoris, layanan ini merupakan kegiatan untuk memfasilitasi ABK dengan kebutuhan khusus mulai dari kebutuhan yang diakibatkan kekurangan di dalam fungsi penglihatan hingga kebutuhan yang diakibatkan kondisi kognitif emosional yang kurang
4. Layanan Pengembangan Potensi, merupakan layanan yang dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan potensi ABK agar dapat menjadi modal bagi ABK untuk bertahan hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah selaku bagian dari *change agent* baik Pemerintah pusat dan khususnya Pemerintah Daerah dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pemerintah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan dan menyediakan fasilitas untuk proses pendidikan ABK ataupun penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dan sesuai jenjang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan dan proses fasilitasi harus dilaksanakan sesuai dengan system pendidikan inklusif dan pendidikan khusus dalam system pendidikan nasional
- (3) Pemerintah di setiap daerah diwajibkan menyertakan ABK dalam program WAJAR (Wajib Belajar) 12 tahun
- (4) ABK wajib diutamakan bersekolah di sekolah terdekat
- (5) Bagi penyandang disabilitas yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal diwajibkan bagi pemerintah untuk memfasilitasinya mendapatkan ijazah pendidikan dengan program kesetaraan

- (6) Menyiapkan beasiswa bagi ABK maupun peserta didik Disabilitas yang memiliki prestasi namun terhambat keterbatasan ekonomi.
- (7) Menyediakan anggaran khusus untuk membiayai pendidikan ABK atau peserta didik disabilitas yang kurang mampu.

Namun, menurut Seminar Umum yang berjudul “Memilih Sekolah yang Tepat Bagi Anak Berkebutuhan Khusus” , potret sekolah inklusif di Indonesia banyak sekali mengalami kendala dimana sebagian besar ABK atau peserta didik disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah terdekat, kendala ini dikarenakan guru yang memiliki kompetensi memadai dalam mendidik ABK masih terbatas bahkan belum ada (Dra. Sari Rudiwati, 2011, pp. 2–3). Permasalahan yang dihadapi lebih lanjut diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di halaman web mereka, adapun permasalahan yang seringkali dihadapi diantaranya:

1. Pelaksanaan pendidikan inklusif masih dipandang sebagai usaha untuk memasukan anak kebutuhan khusus ke sekolah sebagai bentuk meminimalisir diskriminasi bukan sebagai peningkatan kualitas layanan pendidikan, dimana masyarakat kadang melihat bahwa ABK harus menyesuaikan dengan system sekolah bukan sebaliknya.
2. Guru pada pelaksanaan proses belajar mengajar belum bersikap proaktif pada semua anak khususnya ABK sehingga banyak orang tua dari ABK yang melakukan complain dan merasa anak mereka menjadi bahan cemoohan.
3. Kurangnya dukungan dan koordinasi dengan tenaga professional ataupun institusi lain yang bersangkutan

4. Kebijakan sekolah yang tidak tepat sehingga mengakibatkan kurang adanya rasa tanggung jawab pada guru tentang kemajuan ABK
5. Guru masih kesulitan dalam melakukan kurikulum pendidikan inklusif dan masih banyaknya kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ABK yang disamakan dengan siswa lain dan anggapan bahwa ABK tidak cukup mampu untuk mengikuti materi yang diberikan
6. Kualitas guru yang tersedia belum memadai serta belum didukung dengan fasilitas yang memadai serta kurangnya dukungan dari orang tua siswa-siswi.

Meskipun terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif namun, perkembangan keberadaan Sekolah Inklusif sampai saat ini cukup stabil.

Perkembangan sekolah inklusif di Jawa Tengah dalam jurnal yang berjudul *Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Provinsi Jawa Tengah* menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mengadakan 160 (seratus enam puluh) sekolah inklusif rintisan yang disertai dengan pemberian dana operasional bantuan sosial bagi sekolah-sekolah rintisan tersebut. Hingga pada tahun 2015 Seluruh sekolah inklusi di Provinsi Jawa Tengah mencapai 519 sekolah, dalam proses penerimaan siswa baru ABK tidak ada yang memberikan batasan/kuota bagi ABK. Akan tetapi, pelaksanaan proses penerimaan siswa baru ABK di Provinsi Jawa Tengah khususnya pada saat pelaksanaan identifikasi dan penilaian dijalankan dengan cara yang berbeda-beda dengan kata lain belum ada keseragaman dalam proses pelaksanaannya (Haryono, Ahmad Syaifudin, 2015). Pendidikan inklusif diselenggarakan oleh sekolah inklusif dimana sekolah inklusif merupakan sekolah negeri dan memiliki akreditasi A.

Sekolah ini hampir sama dengan Sekolah Luar Biasa hanya saja proses penerimaannya berbeda dengan SLB. Pada perkembangannya, sebanyak 519 sekolah yang menyatakan sebagai sekolah inklusi, namun, guru-guru masih membutuhkan tambahan pembekalan/pelatihan pendidikan inklusif terutama dengan urusan administrasi.

Di Kabupaten Semarang sendiri, melalui data dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Semarang sebanyak 455 sekolah dasar negeri dan 45 sekolah dasar swasta, total jumlah sekolah dasar negeri maupun swasta yang terdapat di Kabupaten Semarang sejumlah 498. Dari 498 sekolah dasar di Kabupaten Semarang, sekolah yang terpilih untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan telah diresmikan yaitu 14 Sekolah Dasar Negeri, sekolah-sekolah tersebut sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Data Peserta Didik Inklusi Tahun 2019/2020

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1.	SD Negeri Klero 02 , Kec. Tengaran	5
2.	SD Negeri Bonomerto 02 , Kec. Suruh	9
3.	SD Sudirman , Kec. Ambarawa	4
4.	SD Negeri Jatijajar 01 , Kec. Bergas	14
5.	SD Klepu 02 , Kec. Pringapus	27
6.	SD Bendungan , Kec. Pabelan	12
7.	SD Susukan 4 , Kec. Ungaran Timur	31

8.	SD Plumutan , Kec. Bancak	10
9.	SD Jetis 01 , Kec. Kaliwungu	12
10.	SD Langensari 01 , Kec. Ungaran Barat	7
11.	SD Pojoksari , Kec. Ambarawa	4
12.	SD Negeri Asinan 01 , Kec. Bawen	Data Belum Masuk
13.	SD Negeri Lodoyonh 02 , Kec. Ambarawa	Data Belum Masuk
14.	SD Negeri Candi 02 , Kec. Bandungan	Data Belum Masuk
Total		135

Sumber : Disdikbudpora Kabupaten Semarang

Sekolah Inklusi yang terpilih ini ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Nomor 421.2 / 106 / 2019 Tentang Penetapan SD Pelaksana Program Inklusi Kabupaten Semarang yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Januari 2019. Regulasi ini seharusnya semakin mendorong pemerintah Kabupaten Semarang untuk serius dalam memberikan pendidikan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2020 ini sedang melakukan pengembangan secara serius untuk sekolah inklusi ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sekolah dan anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, berdasarkan hasil pra-penelitian peneliti terkait permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan inklusif, permasalahan yang paling menonjol adalah mengenai:

1. Ketersediaan guru pembimbing khusus yang masih kurang di beberapa sekolah dasar. Kehadiran guru pembimbing khusus setidaknya terdapat

1 di setiap kelas dimana didalamnya terdapat ABK. Namun, kondisi dilapangan menunjukkan bahwa dalam 1 sekolah hanya terdapat 1 guru pembimbing bahkan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki guru pembimbing khusus.

2. Sarana prasarana yang belum mengakomodasi hadirnya anak berkebutuhan khusus di sekolah regular. Pemerintah Kabupaten Semarang berencana untuk menyediakan ruangan khusus bagi ABK agar tidak terganggu dengan anak-anak lainnya dalam proses belajar mengajar, namun hingga kini rencana tersebut belum terealisasi. Selain itu terdapat kesenjangan fasilitas di beberapa sekolah hal ini dikarenakan penyediaan fasilitas sarana prasarana saat ini disesuaikan kemampuan sekolah, ada yang memiliki sarana prasarana untuk terapi ABK di sekolah, ada yang tidak memiliki sarana tersebut bahkan ketersediaan buku-buku braile juga terbatas.

Hasil temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi *Convention on the Rights of Person with Disabillities* (CPRD) dalam Bidang Pendidikan pada tahun 2017 (Eta Yuni Lestari, 2017, p. 8) menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Semarang menghadapi sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah. Kabupaten Semarang memang tidak memiliki balai rehabilitasi, namun pemerintah Kabupaten

berencana untuk membangun Pusat Sumber Belajar Inklusif yang seharusnya dapat terealisasi pada tahun 2020.

2. Terbatasnya anggaran untuk penyandang disabilitas. Belum adanya anggaran khusus bagi para difabel.
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang professional atau kompeten. Ketersediaan guru pendamping khusus di Kabupaten Semarang masih terbatas, setiap sekolah inklusif hanya memiliki 1 guru pendamping khusus, contohnya di SDN Jatijajar 01 dimana dari 7 guru yang dimiliki hanya 1 guru pendamping khusus.
4. Kurangnya kesadaran keluarga terhadap penyandang disabilitas dengan alasan malu dan memilih untuk menyembunyikan anaknya yang disabilitas. Kondisi di Kabupaten Semarang, masih banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan dan memiliki pola pikir lama dimana anak berkebutuhan khusus merupakan hal yang memalukan sehingga mereka tidak memprioritaskan pendidikan bagi anaknya yang berkebutuhan khusus.
5. Minimnya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa. Sarana prasarana yang di sekolah inklusif di Kabupaten Semarang tidak sama satu dengan lainnya tergantung pada kemampuan sekolah dalam menyediakannya.

Gambar 1. 2.
Fasilitas terapi bagi ABK di salah satu SD N di Kabupaten Semarang



Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/04/23/pqepid423-pemkab-semarang-akan-siapkan-sekolah-khusus-siswa-abk> diakses pada 18 April 2020

Penelitian lain yang juga mendukung hasil pra-penelitian penulis adalah penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar yang menjelaskan hasil temuan penelitiannya terkait evaluasi pelaksanaan program inklusi sekolah dasar di Kabupaten Semarang dengan mengambil studi kasus SD Negeri Klero 02 (Widyawati, 2017). Hasil temuannya adalah:

- (1) Ketersediaan Sarana Prasarana khusus ABK yang belum memadai. Hasil temuan ini juga masih ditemui hingga saat ini dimana fasilitas penunjang untuk para ABK di sekolah inklusif belum tersedia contohnya adalah ketersediaan buku-buku bacaan braille di beberapa sekolah.

- (2) Pelatihan khusus bagi guru yang ada di sekolah belum merata. Hingga kini pelatihan khusus bagi guru ABK belum begitu intensif, program pelatihan lebih sering diadakan untuk guru-guru regular.
- (3) Sekolah belum memiliki guru pembimbing khusus yang sesuai dengan kompetensi. Kondisi ini masih dialami hingga kini bahkan saat ujian kebanyakan guru regular yang mendampingi para ABK seperti terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 1. 3.

Suasana pelaksanaan Ujian di salah satu SD Inklusif Kabupaten Semarang



Sumber: <http://suarabaru.id/2019/04/22/4-siswa-sd-inklusi-se-kecamatan-tengaran-ikut-un-bareng-peserta-reguler/> diakses pada 18 April 2020

- (4) Belum adanya pengawasan yang memadai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Semarang selama ini dilaksanakan tanpa adanya pengawasan rutin.
- (5) Jumlah ABK yang terlayani tergolong variatif dan semua ABK dilayani sekolah dengan menyesuaikan terhadap keadaan dan kemampuan sekolah.

Sebagaimana tertera dalam tabel 1.1 Data Peserta Didik Inklusi Tahun 2019/2020 dimana masih terdapat 3 sekolah yang belum memiliki data jumlah ABK yang bersekolah di SD tersebut dan terdapat beberapa sekolah yang jumlah ABKnya tidak mencapai 5 anak.

- (6) Tingkat kesadaran orang tua yang rendah. Kondisi orang tua ABK di Kabupaten Semarang rata-rata masih enggan untuk menyekolahkan anaknya di SD Inklusif karena adanya rasa malu atau masih adanya pemikiran bahwa anaknya akan sulit untuk mengikuti proses pembelajaran melalui SD Inklusif.

Selanjutnya dalam berita m.republika.co.id, Bupati Kabupaten Semarang membenarkan bahwa fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih kurang. Pemkab Semarang akan berusaha untuk memperbanyak lagi fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, peneliti atau penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan data-data terkait pelaksanaan pendidikan inklusi tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang baik itu dalam media cetak maupun dalam internet terkait proses perencanaan dan penggerakan pelaksanaan pendidikan inklusi ini. Padahal adanya pendidikan inklusi ini merupakan salah satu bentuk manajemen perubahan dalam dunia pendidikan yang harus direncanakan dengan baik, di koordinasikan, dan dijalankan serta di awasi dengan sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait kewajiban Pemerintah Daerah. Namun nyatanya, system pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang belum dijalankan dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Widyawati pada tahun 2019.

Tujuan utama dari perubahan itu adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik (dalam Apri Nuryanto, 2015, p. 4). Dalam hal ini dengan adanya pendidikan inklusi maka, seharusnya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang harus ditingkatkan lebih baik lagi dan seharusnya pihak Dinas terbantu dalam menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun nyatanya, masih ada masyarakat yang merasa kesulitan dalam mendapatkan pendidikan terutama bagi penyandang disabilitas sebagaimana diberitakan dalam Koran Online Pos Jateng dimana Ketua Pusat Pengembangan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM), Siti Dana Panti Retnani menyatakan bahwa dalam pendidikan, banyak anak difabel yang tidak bersekolah. Karena terkendala berbagai hal dan masalah lainnya (Sidiq, 2019). Berita ini dimuat 6 Bulan setelah adanya statement dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang akan mempersiapkan Sekolah Khusus Siswa ABK.

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Kabupaten Semarang, diantaranya:

1. Kurangnya GPK (Guru Pembimbing Khusus)
2. Fasilitas yang belum memadai
3. Pelatihan bagi guru untuk ABK yang jarang dilakukan
4. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi ABK yang masih kurang

5. Pelaksanaan rencana dan pengawasan dari pemerintah yang sampai saat ini belum terlaksana

Beberapa permasalahan tersebut, menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang intervensi sosial dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar dari sudut manajemen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul INTERVENSI SOSIAL DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT SEKOLAH DASAR DI DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Mengapa manajemen pendidikan inklusif belum dapat mencapai proses intervensi sosial di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimanakah sarana prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar dalam perspektif intervensi sosial di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sarana prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan keilmuan dalam kajian Intervensi Sosial dalam Manajemen Pendidikan Inklusif dalam lingkungan pendidikan formal sebagai salah satu alternatif pendidikan bagi ABK.

2. Manfaat Praktis

Bagi Penulis :

1. Memberikan pengetahuan tentang pendidikan inklusif
2. Menambah wawasan mengenai anak berkebutuhan khusus dan intervensi sosial dalam manajemen pendidikannya

Bagi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang :

1. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guna mendukung kualitas pendidikan inklusif.

Bagi Masyarakat :

1. Sebagai informasi mengenai sekolah inklusif
2. Memberikan kontribusi pemahaman bagi para praktisi pendidikan, baik dalam tataran konsep maupun praktis akan pentingnya pendidikan inklusif bagi ABK di lingkungan pendidikan formal.
3. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi yang mengadakan penelitian berikutnya, baik meneruskan maupun mengadakan riset baru

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Administrasi Publik

Menurut Felix A. Nigro dan Llyod G. Nigro dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Inu Kencana Syfiie, 2010, p. 24) :

1. Administrasi Publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah.
2. Administrasi Publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
3. Administrasi Publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian proses politik.

4. Administrasi Publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Menurut Parjudi Atmosudirdjo dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Inu Kencana Syfiie, 2010) Administrasi Publik adalah “Administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”. Kemudian, Edward H.Litchfield, mendefinisikan Administrasi Publik sebagai ilmu yang mempelajari tentang pemerintah dan organisasi hingga system anggarannya.

Menurut Dwight Waldo dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Inu Kencana Syfiie, 2010) Administrasi Publik adalah “Manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”.

Menurut John M.Pfiffer dan Robert V.Presthus dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Inu Kencana Syfiie, 2010) :

1. Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara global, administrasi adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah,

pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Administrasi Publik menurut Prajudi (Jum Anggraini, 2012) mempunyai tiga arti, yaitu pertama, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan), atau semua organ yang menjalankan administrasi negara. Kedua, sebagai aktivitas melayani, atau sebagai kegiatan operasional pemerintah dalam melayani masyarakat (segala kegiatan dalam mengurus kepentingan negara). Ketiga, sebagai proses teknis penyelenggaraan UU, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam penyelenggaraan UU.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi Publik merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif guna mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.5.2 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Thomas S. Khun dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Inu Kencana Syfiie, 2010) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu

Menurut Robert T. Golembiewski dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Inu Kencana Syfiie, 2010) menganggap bahwa standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya, fokus mempersoalkan apa kajian (*what of the field*) atau cara bagaimana memecahkannya (*solution*) persoalan, dan lokus didalamnya

mempermasalahkan dimana lokasi (*where of the field*) atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan.

Paradigma Administrasi Publik dalam buku Konsep Dasar Kebijakan Publik (Suwitri, 2008) yaitu :

1. Paradigma Pertama : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pada tahun 1900 Frank J. Goodnow mengatakan bahwa pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik berkaitan dengan penetapan kebijakan negara atau tujuan dan keinginan negara, fungsi lainnya adalah fungsi administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan atau tujuan dan keinginan negara yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi politik.

Lokus paradigme ini terletak pada birokrasi pemerintahan, kemudian lokus paradigme ini ada pada penetapan tujuan dan keinginan negara (kebijakan negara), sehingga keduanya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari administrasi negara. Kondisi ini yang disebut dikotomi politik dan administrasi.

2. Paradigma Kedua : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini berlokus pada birokrasi pemerintahan dan fokus dari paradigme ini pada pencarian prinsip-prinsip administrasi negara agar pelaksanaan pencapaian tujuan dan keinginan negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien. W.F. Willoughby dalam bukunya "*Principles Of Public Administration*" mengemukakan adanya prinsip-prinsip administrasi dalam setiap jenis organisasi apapun (W. F. Willoughby, 1927)

Pada paradigma ini ditemukan prinsip-prinsip administrasi oleh Luther H. Gullick and Lyndall Urwick yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*.

3. Paradigma Ketiga : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Simon mempertegas hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik dengan pernyataan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dalam proses perumusan kebijakan negara antara administrasi negara dengan administrasi negara yang ebrtugas menciptakan struktur yang kondusif pada masyarakat agar dapat membangkitkan perubahan politik dan sosial yang berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan negara sesuai yang diharapkan.

4. Paradigma Keempat : Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma ini, ilmu administrasi negara mencari induk baru yaitu ilmu administrasi. Ilmu administrasi merupakan studi gabungan teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi, menggunakan bantuan dari ilmu jiwa sosial, administrasi niaga, administrasi negara dan sosiologi untuk mempelajari tingkah laku organisasi, sedangkan ilmu manajemen menggunakan bantuan ilmu statistik, komputer, analisa sistem, ekonomi, dalam mempelajari perilaku organisasi. Prinsip-prinsip ilmu administrasi negara pun tidak dapat melepaskan diri dari bantuan ilmu tersebut. Pada tahun 1960 muncul 'pengembangan organisasi' dalam ilmu administrasi, ilmu administrasi negara pun mulai mengikutinya.

Prinsip-prinsip administrasi berlaku universal, dimana-mana, maka akan muncul keinginan memisahkan antara prinsip-prinsip dalam organisasi publik dan privasi atau bisnis. Lokus ilmu administrasi negara berada pada organisasi publik.

5. Paradigma Kelima : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)

Pada paradigma ini ilmu administrasi negara telah menjadi administrasi negara dengan ditemukannya lokus pada organisasi publik, yang ebrbeda tujuannya dengan organisasi bisnis. Fokus administrasi negara dalam bentuk “Ilmu administrasi negara yang murni’ belum dikemukakan, tetpai penggunaan pengembangan teori organisasi, teknik-teknik terapan yang baru pada ilmu manajemen semakin memperkuat perkembangan ilmu administrasi negara. Bahkan keanekaragam administrasi negara di negara-negara berkembang telah menumbuhkan spesialisasi baru yaitu “*comparative public administration*” .

Administrasi negara telah tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting peranannya dalam proses kebijakan publik, setiap unsur aparatur negara termasuk birokrasi didalamnya, apapun posisinya dari staf hingga jabatan tinggi, memiliki peran dalam proses kebijakan publik sesuai batas kewenangannya masing-masing. Peran dan tanggung jawab aparatur negara atau administrator negara dalam proses kebijakan publik menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya posisi dan jenjang jabatan pemerintahan yang diembannya.

Selain paradigma yang telah disebutkan diatas, terdapat tiga paradigma lainnya yang dijelaskan menurut (Yeremia T. Keban, 2008), diantaranya paradigma

Old Public Administration (OPA), *New Public Management (NPM)*, dan *New Public Service (NPS)* yang sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. *Old Public Administration (OPA) (1970)*

Paradigma administrasi publik klasik atau administrasi publik klasik (*old public administration*) berlangsung dari tahun 1887-1987. Administrasi publik klasik sangat dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson, mantan presiden Amerika Serikat dan guru besar ilmu politik di Princeton University Amerika Serikat. Melalui karya besarnya yang berjudul “*the study of administration*”. Wilson (dalam Syafri, 2012,p.192) menampilkan beberapa pemikiran tentang administrasi publik antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlunya pemisahan antara aktivitas pembuatan kebijakan yang harus dilakukan oleh birokrasi pemerintah (dikotomi politik administrasi). Pemisahan tersebut dilakukan karena jika masalah administratif di campuri politik, akan terjadi penyimpangan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintah menjadi tidak efisien.
- 2) Nilai yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan adalah efisien, ekonomis dan rasionalitas dengan dasar pengambilan keputusan “*bureaucratic rational choice*”.
- 3) Untuk mewujudkan nilai-nilai pada nomor (2) perlu dibangun struktur organisasi yang efisien dan hierarkis. Organisasi yang tepat untuk itu adalah organisasi birokrasi.

Menurut Thoha (Syafri, 2012), secara garis besar ide inti administrasi publik klasik adalah sebagai berikut:

- 1) Titik perhatian pemerintah adalah jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.
 - 2) *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik
 - 3) Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil pada proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan (*implementation*) kebijakan publik
 - 4) Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya
 - 5) Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis
 - 6) Program-program kegiatan di administrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi
 - 7) Nilai-nilai utama administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas
 - 8) Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup sehingga warga negara keterlibatannya amat terbatas
 - 9) Peran administrasi publik dirumuskan secara luas seperti *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*.
2. Paradigma *New Public Management* (NPM) tahun 1990-2000

New Public Management lahir pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi dari kelemahan birokrasi tradisional dalam paradigma administrasi publik klasik. Setyoko (Syafri, 2012) mengompilasi pendapat para ahli mengenai NPM ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Lane NPM menggeser penekanan dari administrasi publik tradisional ke manajemen publik. Model tradisional organisasi dan penyaluran pelayanan publik berdasarkan kehendak pasar (*market-based public service management*) hal tersebut dikatakan Wals dan Flynn.
- 2) Menurut Pollit, Ferlie dkk. NPM dimaknai sebagai visi, ideologi atau seperangkat pendekatan dan teknik manajemen publik yang diadopsi dari sektor swasta.

Menurut Setyoko NPM menganut nilai-nilai dan praktik-praktik administrasi bisnis yang diterapkan ke dalam praktik administrasi publik, misalnya dengan melakukan restrukturisasi sektor publik melalui privatisasi, perampingan struktur birokrasi, mengontrakkan pelayanan publik pada organisasi swasta, penerapan, *outsourcing*, membatasi intervensi pemerintah dan meningkatkan efisiensi melalui pengukuran kerja.

3. Paradigma *New Public Service* (NPS) tahun 2000-sekarang.

Menurut Denhardt & Denhardt (dalam Syafri, 2012, p. 196) ketidakberhasilan NPM mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sosial melahirkan pendekatan baru yang berorientasi kepentingan masyarakat, yaitu *new public service* (NPS). NPS dalam literatur administrasi publik dikenal juga dengan paradigma "*governance, public governance* atau *collaborative government* dalam paradigma *old public administration* (OPA) dan paradigm NPM.

Denhardt & Denhardt (Dunn, 2003, p. 24) menilai bahwa NPM dan OPA terlalu menekankan pada efisiensi dan mengabaikan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik. NPS memperbaiki kekurangan ini dengan konsep pelayanan kepada warga masyarakat bukan kepada pelanggan dalam proses penyelenggaraan administrasi publik dan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif. Dengan demikian, kepentingan publik merupakan hasil dari proses dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama oleh masyarakat dan bukan agregasi kepentingan pribadi atau kelompok administrator publik. Kebijakan publik tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian paradigma administrasi publik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara ilmu administrasi dengan ilmu politik merupakan suatu hubungan yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan

antara satu dengan lainnya yang berfokus pada organisasi publik atau pemerintahan dan berfokus pada prinsip-prinsip ilmu administrasi itu sendiri.

1.5.3 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan manajemen instansi pemerintah. Overman (Yeremias T Keban, 2004) mengemukakan bahwa, manajemen publik bukan “*scientific management*” meskipun sangat dipengaruhi oleh “*scientific management*”. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing, dan controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

Menurut Hyde dan Shafritz yang dikutip oleh Overman (Pasolong, 2010) manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Namun, untuk membedakan keduanya secara jelas dapat dikemukakan bahwa, kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia, dengan kata lain manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Chung dan Megginson menjelaskan, perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh beberapa pandangan mulai dari manajemen deskriptif hingga manajemen strategic, yang kemudian menghasilkan manajemen publik yang dipandang sebagai manajemen yang menunjukkan proses pelaksanaan

pemerintahan yang dilakukan oleh manajer public dalam hal ini adalah pejabat-pejabat di instansi pemerintah (Pasolong, 2010).

Berdasarkan beberapa pengertian ahli diatas , dapat disimpulkan bahwa manajemen publik proses dalam menggerakkan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.

1.5.4 Manajemen

Istilah Manajemen secara bahasa berasal dari kata kerja "*to manage*" yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Kata manajemen berasal dari bahasa latin "*mano*" yang berarti tangan kemudian menjadi "*manus*" yang berarti bekerja berkali-kali.

Pengertian manajemen secara istilah menurut James F. Stoner dalam (Dr. T. Hani Handoko, 2015, p. 4) merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian kemudian penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Siagian mendefinisikan Manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai macam kegiatan yang menggunakan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (Siagian, 2012, p. 5). Definisi tersebut menekankan kepada keahlian yang harus dimiliki oleh pimpinan dalam melaksanakan kegiatan.

George R. Terry dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Inu Kencana Syfiie, 2010) mendefinisikan manajemen sebagai proses (kerangka kerja) yang didalamnya terdapat proses pembimbingan dan pengarahan pada sebuah kelompok ataupun individu-individu dengan tujuan tertentu.

Definisi lain dari manajemen yang lebih lengkap sebagaimana dikemukakan oleh Mulyani A. Nurhadi dalam buku Manajemen Pendidikan (Mohamad Mustari, 2014) , kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.4.1 Unsur - Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen menurut Hasibuan (Hasibuan, 2011, p. 20) terdiri dari:

1. *Man* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana. *Man* atau tenaga kerja manusia merupakan unsur manajemen yang terdiri dari individu-individu yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Unsur ini merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan.
2. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur ini merupakan unsur yang berkaitan dengan

keberadaan anggaran dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen atau operasionalisasi sebuah organisasi..

3. *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. Unsur metode merupakan unsur dalam menentukan cara yang akan digunakan dalam operasionalisasi fungsi-fungsi manajemen, sekaligus sebagai pertimbangan dalam menentukan fasilitas yang dibutuhkan.
4. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Di dalam organisasi bisnis untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan baku sebagai salah satu sarana. Bahan baku dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa bahan baku aktivitas produksi tidak akan mencapai hasil yang dikehendaki.
5. *Machines* yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. *Market* merupakan pasar yang hendak dimasuki produksi baik barang atau jasa untuk menghasilkan uang, mengembalikan investasi dan mendapatkan profit dari hasil penjualan atau tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya.

1.5.4.2 Fungsi – Fungsi Manajemen

Manajemen dalam sebuah organisasi sangatlah penting keberadaannya, hal ini untuk menjamin keberlangsungan operasional organisasi tetap terjaga dan dapat berjalan dengan baik. Dalam menjamin keberlangsungan operasional organisasi maka sebuah organisasi harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Siagian (Siagian, 2012) mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajerial tersebut kedalam 5 fungsi yaitu :

a. Fungsi Perencanaan

Fungsi ini merupakan fungsi awal yang ada dalam sebuah manajemen. Fungsi ini merupakan awalan bagi seorang manajer sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya karena disini seorang manajer harus menyusun rencan-rencana yang menentukan arah dan tujuan dari organisasinya. Pada fungsi ini, manajer perlu melakukan pemilihan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.

b. Fungsi Pengorganisasian

Fungsi ini erat kaitannya dengan cara atau proses untuk mengatur pola kerjasama dengan menggunakan sumber yang dimiliki.

c. Fungsi Pengarahan

Pengarahan, erat kaitannya dengan perencanaan. Ketika perencanaan telah dilaksanakan dengan baik maka perlu pengarahan terutama motivasi pada sumber daya manusia yang dimiliki agar terjadi perpaduan yang selaras yang membantu dalam pencapaian tujuan organisasi.

d. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan cara untuk melihat tingkat realistis perencanaan untuk dilaksanakan sekaligus sebagai tahapan dalam menilai pelaksanaan suatu kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai atau belum dan apa saja kekurangannya.

e. Fungsi Penilaian

Fungsi penilaian di beberapa pendapat biasanya menyatu dengan fungsi pengawasan. Pada fungsi ini, kegiatan untuk melihat apakah semuanya berjalan lancar dan kendala apa yang di hadapi dilaksanakan dengan pedoman yang telah ditetapkan pada saat perencanaan. Atau dengan kata lain fungsi ini berusaha untuk membandingkan hasil dengan rencana yang telah disusun.

1.5.5 Manajemen Perubahan

Perubahan organisasi pada dasarnya menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar di setiap organisasi. Perubahan merupakan sesuatu hal yang sejatinya terus terjadi dan akan terjadi kapanpun.. Eksistensi organisasi menjadi tanggung jawab personil organisasi, khususnya manajer yang dibebani tanggungjawab untuk itu. Karenanya, organisasi memiliki kewajiban melakukan berbagai hal yang memungkinkannya untuk tetap eksis sehingga dapat merealisasikan seluruh tujuan-tujuannya berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (1997:206) dalam buku Manajemen Perubahan (Siahaan & Zen, 2012, p. 1) tujuan utama daripada perubahan organisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional dari setiap dan semua orang di dalam

organisasi yang pada gilirannya memang biasanya tercermin dalam peningkatan kemampuan organisasional sebagai keseluruhan. Adapun perubahan organisasional akan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

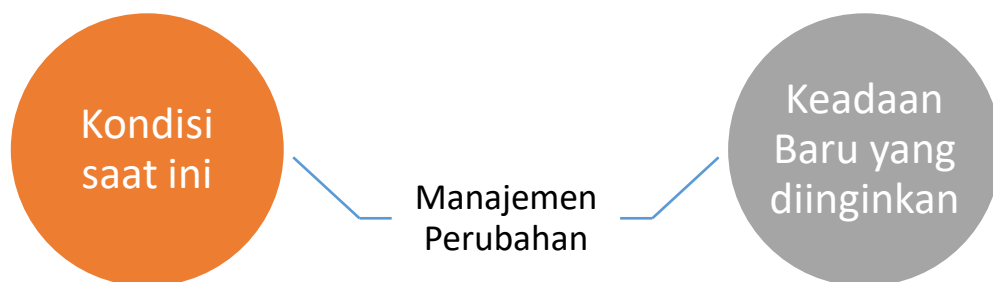
1. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk menampung akibat daripada perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan dan terjadi di luar organisasi
2. Meningkatkan peranan organisasi dalam menentukan arah perubahan yang mungkin terjadi
3. Melakukan penyesuaian secara intern demi peningkatan kemampuan melakukan kedua hal tersebut diatas
4. Meningkatkan daya tahan organisasi, bukan saha untuk mampu tetap bertahan akan tetapi juga untuk terus bertumbuh dan berkembang
5. Mengendalikan suasana kerja sedemikian rupa sehingga para anggota organisasi tetap merasa aman dan terjamin meskipun terjadi perubahan-perubahan di dalam dan diluar organisasi

Perubahan organisasi dilakukan dengan menggunakan analisis manajemen. Analisis manajemen ini akan berguna untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki organisasi untuk dimanfaatkan bagi keunggulan organisasi. Menurut Sianipar dan Entang (2001:102) (Siahaan & Zen, 2012) analisis manajemen merupakan satu penelusuran secara ilmiah keadaan multi faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi guna menentukan faktor kunci sukses dan strategi membangun keunggulan organisasi mencapai sasaran yang lebih besar.

Menurut Tim Creacev, *Director of Research and Development Prosci Research* (2011) (Apri Nuryanto, 2015) manajemen perubahan diartikan sebagai berikut:

"Change management: the process, tools and techniques to manage the people-side of change to achieve a required business outcome. Ultimately, the goal of change is to improve the organization by altering how work is done".

Manajemen perubahan merupakan sebuah proses, alat dan teknik untuk mengelola sekelompok orang atau lebih untuk berubah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja organisasi dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Konsep yang perlu dipahami disini adalah bahwa Manajemen Perubahan berusaha untuk membawa kondisi yang ada saat ini menuju keadaan yang lebih baik sebagaimana dalam konsep yang dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 1. 4. Konsep Dasar Manajemen Perubahan

Sumber: (Apri Nuryanto, 2015)

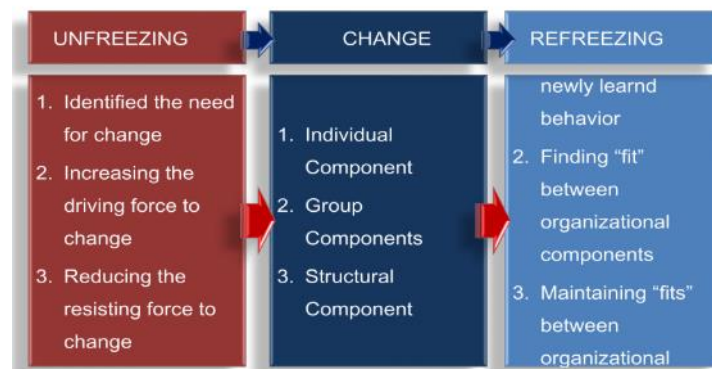
Selanjutnya, dalam manajemen perubahan terdapat 7M yang perlu dikelola dengan baik yakni: *Man, Money, Materials, Machines, Methods, Market, dan Minute*. Manajemen Perubahan terkadang di sebut juga manajemen transisi dan manajemen

inovasi. Dan yang membedakan manajemen perubahan dengan manajemen konvensional adalah faktor yang menghambat perubahan (Apri Nuryanto, 2015).

Manajemen Perubahan memiliki beberapa langkah dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa macam model dalam langkah manajemen, dimana model langkah manajemen perubahan tersebut dikemukakan oleh para ahli diantaranya (Apri Nuryanto, 2015):

1. Kurt Lewin

Dalam menjabarkan langkah manajemen Perubahan, Kurt Lewin menggunakan konsep ilmu fisika dan teknik, adapun langkah tersebut dapat terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. 5. Langkah Manajemen Perubahan menurut Kurt Lewin
 Sumber: (Apri Nuryanto, 2015)

Tahap *Unfreezing* (Tahap Pencairan), dilaksanakan bertahap untuk menjelaskan arti pentingnya perubahan dan memperkuat dorongan untuk berubah, serta mengurangi hambatan perubahan. Pada tahap ini, akan muncul resistensi yang lebih besar oleh karena itu perlu adanya pencairan

agar kesadaran dapat timbul dalam diri masyarakat sebagaimana besi yang perlu dicairkan dahulu baru nantinya dibentuk.

Kemudian, Tahap *Change* atau mengubah, dilakukan langkah mengubah komponen individu, struktur, dan kelompok. Pada tahap ini, daya dorong lebih besar dari pada tingkat resistensi sehingga perubahan dapat berjalan, namun bila daya dorong lebih kecil maka perubahan tersebut akan gagal. Oleh karena itu perlu adanya dorongan yang kuat dalam perubahan.

Tahap ketiga yakni tahap *Refreezing* atau tahap pembekuan merupakan tahap dimana dilakukan pemberian dorongan pada pelaku baru, menyesuaikan antar komponen organisasi, dan memelihara antar komponen organisasi yang telah sesuai. Ketika manajemen perubahan mencapai tahap ini, maka dorongan terhadap perubahan sudah lebih besar daripada hambatan sehingga perubahan berjalan dengan baik.

2. Model Mike Green

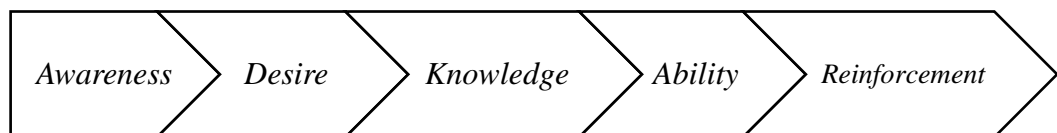
Mike beranggapan bahwa dalam suatu perubahan hal utama yang sangat penting untuk diubah adalah pola pikir, budaya dan kepemimpinan, oleh karena itu Mike merumuskan 6 langkah dalam manajemen perubahan yakni:

- 1) Orientation: kegiatan menentukan arah perubahan
- 2) Organization: tahap mengatur orang-orang kedalam masing-masing kewajiban dan strategi untuk melaksanakan perubahan
- 3) Mobilization: proses kegiatan motivasi, menggerakkan hingga memfasilitasi orang yang sudah ditetapkan.

- 4) Implementation: proses kegiatan untuk melaksanakan rencana perubahan
- 5) Transition: Kegiatan pengelolaan agar orang melaksanakan perubahan dan tetap melanjutkannya
- 6) Integration: menggabungkan seluruh perubahan dalam bentuk baru yang utuh.

3. Model ADKAR

ADKAR merupakan model yang dikembangkan oleh Proci dan ini merupakan singkatan dari Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement.



Gambar 1. 6. Langkah Manajemen Perubahan menurut Proci
Sumber:(Apri Nuryanto, 2015)

Tahap *Awareness* adalah tahap dimana pemimpin meningkatkan kesadaran anggota terkait pentingnya suatu perubahan. Tahap *Desire* merupakan tahap dimana pemimpin mengajak anggota agar mau mendukung sebuah perusahaan. Ketiga tahap *knowledgee*, yaitu tahapan dimana anggota organisasi meningkatkan pengetahuan sebagai bekal melaksanakan perubahan. Kemudian tahap *ability* yakni tahap meningkatkan kemampuan para anggota agar dapat mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan. Terakhir adalah tahap Reinforcement yakni tahap

diman pimpinan memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh anggota organisasi secara terus menerus agar hasil perubahan yang telah dicapai dapat dipertahankan.

1.5.6 Intervensi Sosial

Intervensi sosial adalah sebuah perubahan yang telah direncanakan, dilaksanakan oleh *agent of change* kepada sasaran perubahan baik itu individu, keluarga, hingga kelompok tingkat daerah hingga global (Isbandi Rukminto Adi, 2008).

Intervensi sosial (dalam Hardjomarsono, n.d., p. 4) adalah tindakan yang bertujuan untuk membantu orang perorangan atau kelompok atau keluarga atau komunitas dalam konteks kehidupan sosial. Johnson (Hardjomarsono, n.d.) menyatakan (1) tindakan spesifik yang dikerjakan oleh seorang pelaku intervensi, yang terkait dengan upaya untuk menimbulkan perubahan. (2) Sebuah alat yang digunakan pelaku intervensi untuk memecahkan masalah-masalah dengan cara yang rasional.

Tujuan terpenting dalam melakukan intervensi adalah membantu sasaran intervensi agar dapat melakukan perubahan seperti yang diharapkan. Ketika pada awal intervensi terdapat gangguan atau keadaan yang tidak diharapkan maka pada akhir pelaksanaan diharapkan klien mengalami perubahan berikut:

1. Dapat memperoleh kembali keberfungsian-sosialnya selaku anggota masyarakat yang layak;
2. Memperoleh kemampuan untuk mengatasi gangguan yang dihadapinya;

3. Meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dalam kehidupannya dengan teknik penyelesaian masalah yang lebih baik;
4. Lebih mampu menjalankan peranan-peranan barunya sesuai dengan perkembangan dirinya sehingga gangguan serupa dapat dicegah supaya tidak berulang lagi.

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi sasaran kegiatan intervensi maka upaya intervensi dalam aspek sosial kemudian dipilah menjadi seperti berikut:

1. Memberikan bantuan untuk memulihkan keberfungsian-sosial seseorang, atau orang-orang, keluarga, kelompok atau komunitas sebagai warga keluarga, warga kelompok atau komunitas yang layak;
2. Kegiatan lain-lainnya untuk mengatasi atau mencegah timbulnya masalah-masalah;
3. Mencapai tujuan-tujuan perbaikan sosial.
4. Membantu atau mendorong klien untuk mengalami perkembangan yang diinginkan.

Terdapat beberapa metode atau praktik intervensi yang lazim digunakan untuk membantu, diantaranya:

1. **Praktik Mikro** → memusatkan perhatiannya pada pelayanan langsung kepada orang perorangan berdasarkan pelayanan kasus demi kasus. Biasanya dilaksanakan di badan intervensi klinis.

2. **Praktik Mezzo** → ditujukan untuk pemberian bantuan bagi keluarga dan kelompok kecil. Pada praktik ini terdapat beberapa kegiatan mulai dari komunikasi negosiasi hingga komunikasi yang mempengaruhi.
3. **Praktik Makro** → diarahkan untuk mendatangkan perbaikan dan perubahan-perubahan dalam komunitas. Menurut Skidmore dalam Hardjomarsono (2014: 10) praktik makro dinyatakan sebagai pendekatan antar kelompok untuk menghadapi dan mengatasi patologi sosial.

1.5.6.1 Tahap-Tahap Intervensi Sosial

Pincus dan Minahan dalam (Raharjo,2017) , intervensi sosial meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Penggalian Masalah

Tahap ini merupakan tahap pekerja sosial untuk mendalami kondisi yang ada agar dapat membantu pekerja sosial memahami, mengidentifikasi serta menganalisis faktor terkait masalah yang dihadapi yang kemudian dijadikan dasar untuk memutuskan masalah yang akan diselesaikan hingga cara penyelesaiannya. Tahap ini terdiri dari beberapa poin yaitu:

- Identifikasi dan penentuan masalah
- Analisis dinamika situasi sosial
- Menentukan tujuan dan target
- Menentukan tugas dan strategi
- Stabilisasi upaya perubahan

2. Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap untuk mengumpulkan informasi, data, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan yang biasanya dilakukan melalui proses pendekatan wawancara pada masyarakat, pengamatan dan pengumpulan data dari dokumen-dokumen lainnya.

3. Melakukan Kontak Awal

4. Negosiasi Kontrak

Pada tahap ini, pekerja sosial akan melakukan kontak yang melibatkan sasaran intervensi sebagai upaya perubahan.

5. Membentuk Sistem Aksi

Tahap ini adalah tahap pekerja sosial dalam menentukan kegiatan atau aksi apa yang akan dilaksanakan dalam upaya perubahan.

6. Menjaga dan Mengkoordinasikan Sistem Aksi

Tahap ini adalah tahap dimana pekerja sosial melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait atau pihak yang berpengaruh untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan

7. Memberikan Pengaruh

8. Terminasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dimana kegiatan pekerja sosial berkisar pada pelayanan yang diberikan ketika tujuan telah tercapai

1.5.7 Manajemen Pendidikan Inklusif

Pendidikan merupakan usaha yang terencana dalam rangka menciptakan fasilitas belajar dan proses belajar dengan tujuan peserta didik dapat mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual dan mampu

mengendalikan diri bagi nusa dan bangsa, definisi ini berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bush menyatakan manajemen pendidikan merupakan sebuah studi dan praktek berkaitan dengan operasional organisasi badan pendidikan, dimana organisasi pendidikan sejatinya membutuhkan bentuk pengaturan kegiatan atau system yang sistematis yang dijadikan patokan pelaksanaan kegiatan operasional dalam sebuah kegiatan pendidikan (Bush dan Coleman, 2000:4).

Suharno (2008:19), menjelaskan bahwa terdapat 7 komponen dalam manajemen pendidikan inklusif yang terdiri:

1. Kurikulum Dan Pengajaran;
2. Tenaga Kependidikan;
3. Kesiswaan;
4. Keuangan;
5. Sarana Dan Prasarana
6. Pengelolaan Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Manajemen Pelayanan Khusus
7. Manajemen Waktu.

Uraian terkait manajemen pendidikan dari beberapa ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan sejatinya adalah bentuk kerjasama manusia dalam studi dan praktek penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan.

Ruang lingkup adari manajemen pendidikan sendiri menurut Permendiknas Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dalam pengelolaan sekolah/madrasah terdiri dari:

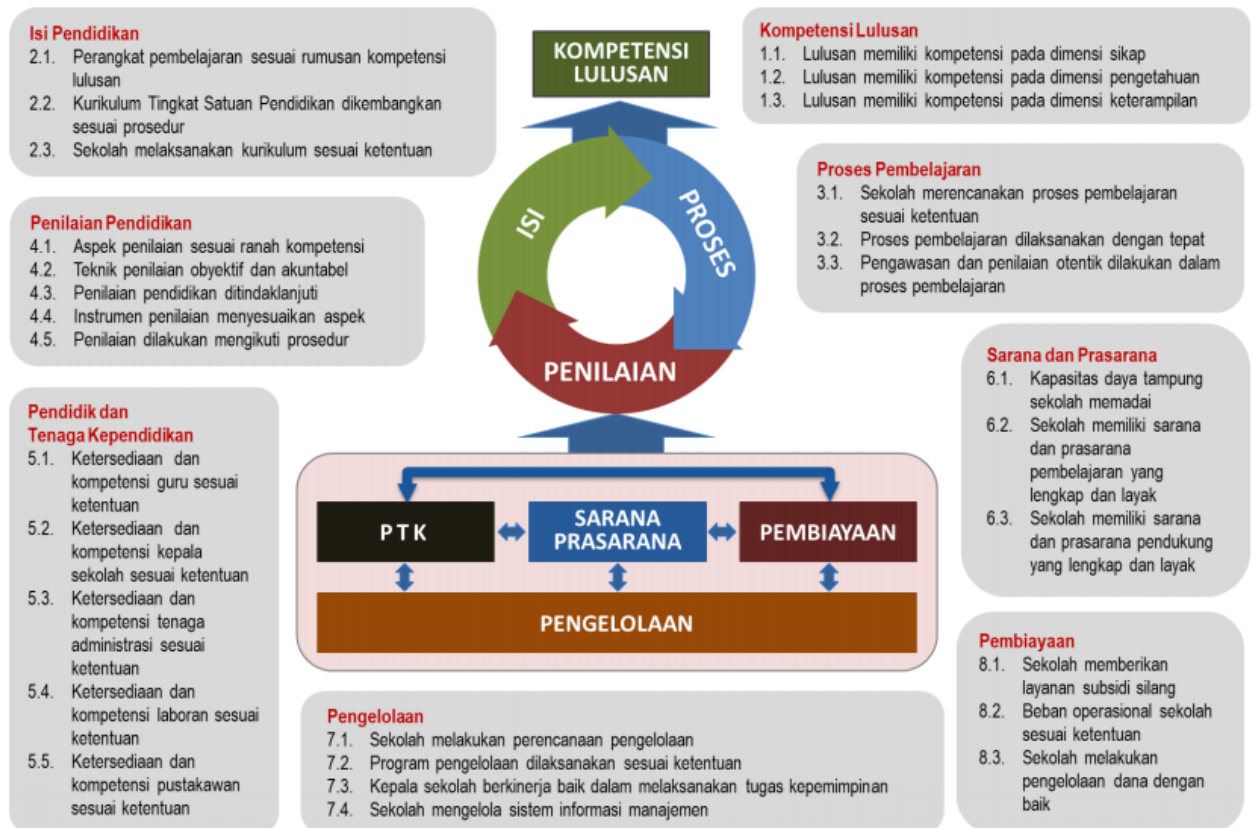
1. Rencana Program Sekolah
2. Pelaksanaan Program Sekolah
3. Kepemimpinan
4. Pengawasan/evaluasi
5. Sistem Informasi Manajemen

1.5.7.1 Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan bahwa Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal berkaitan dengan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Lingkup Standar Nasional Pendidikan tersebut terdiri dari 8 standar, yaitu :

- a. Standar Isi; merupakan ruang lingkup berkaitan dengan materi dan kompetensi yang di cantumkan pada kriteria tentang kompetensi-kompetensi dalam pendidikan.
- b. Standar Proses; merupakan standar yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sebuah sekolah
- c. Standar Kompetensi Lulusan; merupakan kualifikasi kemampuan peserta didik yang telah lulus mulai dari sikap sampai keterampilan

- d. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; merupakan kriteria pendidikan berkaitan dengan pendidikan prajabatan dan kelayaakan fisik dan mental
- e. Standar Sarana Dan Prasarana; berkaitan dengan fasilitas yang digunakan oleh institusi pendidikan dalam menjalankan proses belajar mengajar.
- f. Standar Pengelolaan; berkaitan dengan manajemen yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan dan efisiensi serta efektivitas yang tercapai.
- g. Standar Pembiayaan; berkaitan dengan komponen pembiayaan atau anggaran dalam operasional institusi pendidikan dalam jangka waktu tertentu.
- h. Standar Penilaian Pendidikan: berkaitan dengan mekanisme hingga instrument penilaian untuk peserta didik.



Sumber : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2017

1.5.7.2 Komponen Manajemen Pendidikan

Komponen-komponen Manajemen Berbasis Sekolah sama dengan ruang lingkup Manajemen Pendidikan. Komponen manajemen pendidikan menurut Suryosubroto (2010:32-163) yaitu : (1) manajemen kurikulum; (2) manajemen kesiswaan; (3) manajemen personalia; (4) manajemen fasilitas pendidikan; (5) manajemen tata laksana sekolah; (6) manajemen keuangan; (7) pengorganisasian sekolah; (8) hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas).

1. Manajemen Kurikulum : Kurikulum adalah proses pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di sekolah.
2. Manajemen Kesiswaan / Peserta Didik: merupakan aturan kegiatan bagi peserta didik dari awal masuk hingga peserta didik tersebut lulus (Mulyasa,2005:46).
3. Manajemen Personalia: Manajemen personalia merupakan proses penataan berkaitan dengan masalah perolehan dan penggunaan tenaga kerja di sekolah secara efisien, agar tujuan sekolah dapat tercapai.
4. Manajemen Fasilitas Pendidikan: merupakan proses yang berkaitan dengan penataan, pengadaan, pendayagunaan, hingga pengolahan fasilitas pendidik untuk mencapai tujuan.
5. Manajemen Tata Laksana Sekolah: merupakan proses kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun hingga menyimpan seluruh berkas-berkas administrasi yang diperlukan oleh institusi yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengarsipan dimana tata laksana ini terdiri dari beberapa hal yaitu:
 - a. Surat dinas dan buku agenda
 - b. Buku ekspedisi
 - c. Buku catatan rapat sekolah
 - d. Buku pengumuman
 - e. Pemeliharaan gedung
 - f. Pemeliharaan halaman sekolah
 - g. Pemeliharaan perlengkapan sekolah

h. Kegiatan manajemen yang didindingkan

6. Manajemen Keuangan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah akan diterapkan dalam Manajemen Berbasis Sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

7. Organisasi Sekolah

Organisasi Sekolah menghendaki pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kemampuan, fungsi dan wewenang. Suryosubroto mengemukakan bahwa melalui struktur organisasi yang ada akan mengetahui tugas dan wewenang kepala sekolah, guru dan tugas dari karyawan sekolah.

8. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Hubungan Masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara lembaga dan masyarakat dengan tujuan memperoleh pengertian, kepercayaan, penghargaan, hubungan harmonis, serta dukungan (*goodwill*) secara sadar dan sukarela.

Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk menarik simpati masyarakat umumnya demi mensukseskan program-program sekolah. Hubungan

sekolah dengan masyarakat yang baik akan menjadi sebuah dukungan atas penyelenggaraan pendidikan.

1.5.8 Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan bentuk penyelenggaraan system pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya dalam proses belajar mengajar. Pendidikan inklusif dapat diartikan atau diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang yang muaranya adalah kegagalan atau keberhasilan. Isu utama dalam system pendidikan ini adalah dasar yang digunakan berkaitan dengan hak asasi dan model sosial , sistem yang harus disesuaikan dengan anak, bukan anak yang menyesuaikan dengan sistem.

Pendidikan Inklusif dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan anak, pendidikan , keberagaman dan diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia. Kebingungan orang tentang pendidikan inklusif diakibatkan oleh penggunaan bermacam-macam istilah seperti inklusi, integrasi, mainstreaming, pendidikan luar biasa dan pendekatan unit kecil secara bertukar-tukar tanpa kejelasan atau definsi yang pasti. Pendidikan inklusif sejak awal dirancang mempertimbangkan siswa berkebutuhan khusus untuk bergabung dalam struktur social yang sama, baik dalam ruang kelas dan sekolah umum , dalam hal ini diperkuat dalam jurnal yang berjudul *Inclusion And Intergration On Special Education* (Rodriguez & Garro-Gil, 2015) penulis menyebutkan bahwa terdapat empat tahap perkembangan yaitu :

- a. pengecualian: orang-orang penyandang cacat atau kebutuhan khusus dikeluarkan dari semua konteks sosial (keluarga, sekolah, komunitas);
- b. segregasi: dipahami bahwa mereka memerlukan dan kemungkinan akan dididik tetapi tetap, terpisah dari masyarakat;
- c. integrasi: pada tahap ini, sekolah umum diharuskan untuk membuat ruang baru bagi siswa berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan siswa non-difabel lainnya. Di dalam "ruang-ruang" itu ada ruang kelas reguler, ruang kelas pendidikan khusus dan layanan tarik keluar (Franklin, 1996: 18)
- d. tahap inklusif: struktur sosial (ruang kelas, sekolah, komunitas) dan aksi sosial-pendidikan dirancang sejak awal mengingat siswa dengan kebutuhan khusus

Pada tahun 1994, UNESCO pertama kali menyatakan bahwa sekolah inklusi adalah cara paling efektif dalam melawan pendekatan dan sikap diskriminatif terhadap siswa penyandang cacat. Legislasi dan kebijakan internasional selanjutnya berkembang untuk menantang praktik pengucilan dan memfokuskan perhatian pada kesetaraan dan akses kepada pendidikan berkualitas tinggi bagi semua orang, sembari menghormati keragaman.

Definisi pendidikan inklusif, seiring dengan perubahan waktu, mengalami perkembangan sejalan dengan proses perenungan individu yang ada terhadap praktek yang ada, dan sejalan dengan dilaksanakannya pendidikan inklusif dalam berbagai budaya dan konteks yang semakin luas. Hal ini sejalan dengan apa yang

dikemukakan oleh Berlach & Chambers dalam jurnal (Loreman et al., 2014) bahwa segala bentuk yang tercatat (*inclusive*) didalam ilmu pendidikan telah menimbulkan banyak perkara dan perdebatan yang oleh karena kurangnya konsep yang padat/lengkap dan terperinci / fokus, dimana dapat menimbulkan kesalahpahaman dan salah fokus dalam penerapannya. Inklusi dalam pendidikan telah diakui sebagai hak asasi manusia dan hak dasar untuk masyarakat yang lebih adil dan setara. Penafsiran pendidikan inklusi menjadi tantangan bagi pendidik dan sistem pendidikan dalam mengajar dan belajar dengan cara yang berbeda dari berbagai prespektif.

Hildegun Olsen menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya (Tarmansyah, 2007) . Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat hingga anak-anak jalanan dan pekerja anak yang berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah.

UNESCO dalam *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*, mendefinisikan bahwa inklusi merupakan proses respon keragaman terhadap kebutuhan seluruh peserta didik dengan peningkatan partisipasi pembelajaran seta mengurangi pengecualian atau diskriminasi dalam dunia pendidikan sengan melibatkan perubahan dalam isi hingga visi bersama yang berkaitan dengan anak dalam rentang usia tepat (UNESCO, 2005, p. 25).

Sopan and Shevin (dalam Kustawan & Hermawan, 2013) memaknai inklusi sebagai sistem layanan Pendidikan Luar Biasa bagi ABK dengan syarat seluruh

ABK memiliki keinginan belajar bersama dengan anak-anak lain dalam kelas yang sama pada suatu sekolah.

Permendiknas No. 70 tahun 2009 menjelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan system pendidikan dimana setiap peserta didik diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan dan secara bersama-sama berproses dalam belajar dengan peserta didik pada umumnya.

Selanjutnya, dalam peraturan ini disebutkan bahwa pendidikan inklusif memiliki tujuan untuk memberi kesempatan pada ABK untuk mendapatkan pendidikan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menerapkan sikap toleransi dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik.

Pendidikan Inklusif dalam (Kurth et al., 2018, p. 29) dijelaskan sebagai sebuah proses untuk membantu mengatasi hambatan dalam kehadiran, partisipasi dan prestasi di kelas pendidikan umum, pendidikan yang inklusif diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat sistem pendidikan untuk semua pelajar. Pendidikan yang inklusif merujuk kepada semua siswa, termasuk mereka yang cacat yang diidentifikasi secara historis, serta merujuk pada keanggotaan penuh dalam kelas-kelas pendidikan umum melalui bantuan dan layanan untuk memungkinkan kaum muda untuk berhasil di tempat itu (Waitoller & Kozleski, 2013:23).

Inklusif adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam program sekolah. Inklusif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *inclusion*. Bagi sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-

anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh.

Fokus pendidikan inklusi tidak boleh pada keterbatasan dan kekurangan mereka, namun pendidikan inklusi difokuskan pada potensi untuk menunjang perkembangan mereka. Dalam pendidikan inklusif semua anak yang masuk ke dalam sekolah umum diwajibkan melakukan *assessment*. *Assessment* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengajaran karena untuk menentukan tingkatan peserta didik, seberapa jauh sasaran pendidikan dipenuhi dan seberapa jauh kegiatan pengajaran yang direncanakan menuntun pada pembelajaran yang dimaksudkan (Kefallinou & Donnelly, 2016, p. 210).

Istilah *assessment* lebih umum mengacu pada 'cara guru dan orang lain yang terlibat dalam pendidikan murid secara sistematis mengumpulkan dan kemudian gunakan informasi tentang tingkat pencapaian dan / atau perkembangan murid itu di berbagai bidang pengalaman pendidikan mereka. Dalam (Kefallinou & Donnelly, 2016, p. 210) juga menyebutkan bahwa Informasi *assessment* diperlukan untuk berbagai keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan yang berbeda pada tingkat sistem yang berbeda, dan mungkin mencakup :

- Penyaringan dan penilaian untuk mengidentifikasi hambatan untuk pembelajaran dan partisipasi.
- Membuat keputusan tentang alokasi sumber daya dan kelayakan untuk dukungan atau layanan tertentu.
- Merencanakan dan mengadaptasi kurikulum dan pedagogi untuk memberikan yang terbaik dalam peluang belajar.

- Memantau kemajuan pelajar dan menginformasikan pengajaran dan pembelajaran.
- Memantau dan mengevaluasi kualitas dan efektivitas biaya sistem dan penyediaan dan menggunakan informasi untuk merencanakan perbaikan.
- Memegang akuntabilitas berbagai pemangku kepentingan.

Kebijakan *assessment* dikembangkan dan memiliki dampak langsung pada inklusi dan lebih khusus tentang praktik dalam pengaturan inklusif. Penilaian bersifat inklusif ketika memperhitungkan kebutuhan semua peserta didik, memastikan bahwa mereka semua mengambil bagian dalam prosedur penilaian dan kegiatan belajar direncanakan agar hasilnya sesuai untuk setiap individu.

Dari beberapa pendapat ahli diatas , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, maupun SMK).

1.5.9 Konsep Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK terdiri dari berbagai macam kelompok dengan kekhususan masing-masing. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa terdapat 12 jenis peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yaitu: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, dan korban penyalahgunaan narkoba, serta yang memiliki kelainan lain. Namun, kelompok peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ini tidak dimasukkan

dalam kategori anak berbakat sedangkan dalam UU No. 20 th 2003 tentang Sisdiknas, dikatakan bahwa kelompok peserta didik meskipun berkebutuhan khusus apabila memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa tetap dimasukkan dalam kategori anak berbakat meskipun perlu mendapatkan pendidikan khusus.

ABK kemudian dapat digolongkan lagi sesuai jenis kebutuhan khususnya yang kemudian terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kebutuhan khusus yang terkait dengan kondisi di atas normal yakni merupakan kondisi seseorang yang melebihi batas normal dalam bidang kemampuan anak-anak ini seringkali disebut anak berbakat atau *gifted child*, dan kebutuhan khusus yang terkait dengan kondisi di bawah normal yang seringkali dikenal dengan berbagai istilah dan terdiri dari beberapa jenis diantaranya: (1) tunanetra, (2) tunarungu, (3) gangguan komunikasi, (4) tunagrahita, (5) tunadaksa, (6) tunalaras, (7) berkesulitan belajar, dan (8) tunaganda, yang masing-masing mempunyai kebutuhan khusus sendiri-sendiri. Berikut adalah penjelasan setiap jenis peserta didik dengan kebutuhan khusus tersebut karena kategori ini sebagian besar sejalan dengan keberadaan layanan pendidikan khusus/luar biasa di Indonesia (Wardani, n.d.)

1.6. Definisi Konsep

a. Intervensi Sosial

Dari definisi yang dilontarkan oleh Isbandi,2008 dan Hardjomarsono, Penulis menyimpulkan bahwa Intervensi sosial adalah sebuah perubahan yang prosesnya terencana yang dilakukan oleh agen perubahan terhadap kelompok sasaran yang bertujuan membantu sasaran dalam konteks sosial. Pada penelitian ini, intervensi sosial merupakan perubahan yang dilakukan terencana dengan melihat tahap-tahap atau upaya intervensi yang dilakukan.

Menurut Pincus dan Minahan (1973:101-117) dalam *Social Work Journal* (2014:187) , intervensi sosial meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Penggalan Masalah

Penggalan Masalah, merupakan tahap di mana pekerja sosial mendalami situasi dan masalah klien atau sasaran perubahan. Tujuan dari tahap penggalan masalah adalah membantu pekerja sosial dalam memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor-faktor relevan terkait situasi dan masalah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penggalan masalah tersebut, pekerja sosial dapat memutuskan masalah apa yang akan ia selesaikan, tujuan dari upaya perubahan, dan cara mencapai tujuan.

Penggalan masalah terdiri dari beberapa konten, di antaranya :

- Identifikasi dan penentuan masalah
- Analisis dinamika situasi sosial
- Menentukan tujuan dan target
- Menentukan tugas dan strategi

- Stabilisasi upaya perubahan

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap di mana pekerja sosial mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait masalah yang akan diselesaikan. Dalam melakukan pengumpulan data, terdapat tiga cara yang dapat digunakan, yaitu: pertanyaan, observasi, dan penggunaan data tertulis.

3. Melakukan Kontak Awal

4. Negosiasi Kontrak

Negosiasi Kontak merupakan tahap di mana pekerja sosial menyempurnakan tujuan melalui kontrak pelibatan klien atau sasaran perubahan dalam upaya perubahan.

5. Membentuk Sistem Aksi

Membentuk system aksi merupakan tahap di mana pekerja sosial menentukan sistem aksi apa saja yang akan terlibat dalam upaya perubahan

6. Menjaga dan Mengkoordinasikan Sistem Aksi

Merupakan tahap di mana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perubahan.

7. Memberikan Pengaruh

8. Terminasi

Terminasi merupakan tahap pengakhiran kegiatan pertolongan pekerjaan sosial yang dilakukan apabila tujuan pertolongan telah tercapai atau penerima pelayanan memerlukan rujukan ke lembaga lain.

b. Manajemen

Manajemen merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini manajemen dilihat dari fungsi manajemen dalam melakukan intervensi sosial pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Fungsi-fungsi diantaranya sebagai perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), pengawasan/pengendalian (*controlling*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan POAC

c. Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif merupakan pendidikan dimana didalam sebuah sekolah ABK memiliki kesempatan untuk belajar bersama dengan siswa lainnya yang dinilai efektif melawan diskriminasi dimana sekolah harus mengakomodir seluruh kebutuhan anak tanpa membedakannya, sebagaimana konsep dari UNESCO, 1994 dan Tarmansyah,2007

1.7 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian yang akan diamati didasarkan pada proses pelaksanaan intervensi sosial dan faktor yang menghambat serta mendukung proses intervensi sosial dalam Manajemen Pendidikan Inklusif yang meliputi:

1. Manajemen Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar dalam Perspektif Proses Intervensi Sosial Di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang, akan dilihat melalui fenomena:
 - a. Tahap Perencanaan, yakni proses dimana tahap intervensi sosial penggalan masalah dan pengumpulan data dilaksanakan. Dalam tahap ini, fenomena yang akan diteliti adalah cara Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Semarang dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada, serta merencanakan tujuan dari pendidikan inklusif mulai dari proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana untuk melaksanakan manajemen pendidikan inklusif
 - b. Tahap Pengorganisasian, yakni proses pengaturan kerja dimana dalam proses ini penulis akan melihat fenomena yang terdiri dari tahap kontak awal dan negosiasi kontrak. Fenomena yang akan diteliti adalah cara Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Semarang dalam melakukan kontak awal dengan sekolah-sekolah dasar terkait pelaksanaan pendidikan inklusif dan proses koordinasi yang terjadi didalamnya.

- c. Tahap Penggerakan, yakni proses dimana rencana dijalankan, dalam proses ini, penulis akan melihat fenomena dari system aksi yang terbentuk dan system koordinasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- d. Tahap Pengawasan, yakni proses untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan awal. Dalam proses ini, fenomena yang diteliti cara Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pendidikan inklusif tersebut agar memberikan pengaruh positif pada masyarakat dan terminasi yang terbentuk dalam proses tersebut, serta system pengawasan dari dinas.

2. Komponen Manajemen Pendidikan Inklusif tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Semarang

Fenomena ini bertujuan untuk mengetahui kondisi komponen- komponen manajemen pendidikan inklusif selama proses intervensi sosial yang terdiri dari:

1. Kurikulum
2. Peserta Didik
3. Personalia
4. Fasilitas Pendidikan
5. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

1.8 Metoda Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Nana (2007:72) Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alami atau rekayasa manusia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis berbagai bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan dengan fenomena lainnya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif diharapkan peneliti dapat menemukan fakta terkait fenomena yang akan diteliti.

1.8.2 Desain Penelitian

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (2008, pp. 4–5), penelitian digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Penelitian Eksploratif adalah penelitian yang bersifat terbuka, yang berusaha untuk menelusuri atau menggali ada tidaknya suatu masalah atau ingin mengetahui secara mendalam akan suatu masalah tertentu.
2. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial tertentu, dalam menghimpun fakta tidak menggunakan hipotesis namun terdapat analisis seperti: analisis tabel, analisis presentase, analisis deduktif-induktif, dan sebagainya.

3. Penelitian Eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penelitian yang akan diajukan guna diterima atau ditolak.

Oleh karena itu, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan gejala sosial tertentu, dalam hal ini gejala sosial dilihat dari permasalahan pendidikan inklusif di Kabupaten Semarang. Untuk melihat Manajemen Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar dalam Perspektif Intervensi Sosial di Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Semarang.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokus atau wilayah penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang karena dinas pendidikan yang dalam hal ini menangani penyelenggaraan Pendidikan Iklusif.

1.8.4 Teknik Penentuan Informan

Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, tetapi tergantung pada tepat atau tidaknya dalam pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai. Mengapa peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* sebab dalam penelitian

ini ruang lingkupnya melibatkan masyarakat luas, oleh karena itu, teknik *snowball* sampling ini dianggap lebih pas untuk digunakan.

Adapun informan yang dipilih adalah :

1. Kepala Seksi Kurikulum Siswa Tingkat SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
2. Pengawas TK/SD Korwil Kecamatan Bergas
3. Ketua KKKS Layanan Inklusi Kab. Semarang
4. Kepala Sekolah SD N Klero 02
5. Kepala Sekolah SD N Jatijajar 01 Bergas
6. Guru Pembimbing Khusus SD N Jatijajar 01 Bergas
7. Guru Kelas SD N Jatijajar 01 Bergas

1.8.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer namun lebih mengutamakan analisis data sekunder.

1. Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustakaan yang berupa bukubuku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.
2. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni sumber data dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting pada sebuah penelitian, pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Studi Pustaka

Taknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen yang memiliki kaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder. Sumber data ini bisa berasal dari dokumen, peraturan hingga artikel tentang Manajemen Pendidikan Inklusif.

Peneliti melakukan studi pustaka dengan mencari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan adanya pendidikan inklusif dari pusat hingga ke daerah. Selanjutnya mencari jurnal terkait penelitian terdahulu mengenai pendidikan inklusif di Kabupaten Semarang.

2. Observasi

Teknik ini merupakan teknik dengan metode pengamatan pada kegiatan yang diinginkan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi digunakan untuk menggali data-data langsung dari objek penelitian.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data lebih lengkap sehingga tingkat makna hingga fenomena yang diteliti mulai tampak. Metode ini

dilakukan dengan cara melihat dan mengamati kemudian dicatat langsung terkait apa yang terjadi di lapangan.

Peneliti melakukan observasi mulai dari pelaksana program inklusif yang disini adalah sekolah-sekolah pelaksana program inklusif kemudian melakukan observasi ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

3. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan teknik dimana dua orang bertemu untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Teknik ini dilaksanakan dengan cara lisan pada sebuah pertemuan tatap muka. Teknik ini digunakan peneliti untuk melakukan studi pendahuluan.

Teknik ini dilakukan dengan jenis wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan penelitian. Pelaksanaannya sendiri menggunakan instrument pedoman wawancara atau interview guid dimana pertanyaan dapat berkembang mengikuti kondisi yang ada. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang profil lembaga, sejarah lembaga dan penyelenggaraan pendidikan inklusi, perencanaan yang dibuat, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta hubungan dengan masyarakat. Wawancara ditujukan pada subyek penelitian yaitu Kepala Sekolah, manajer pendidikan inklusi dan pendamping. Hasil wawancara tersebut dapat dicatat dan diinterpretasikan sehingga dapat menjadi data yang digunaan dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan pertama kali dengan Kepala SD N Jatijajar 01 , kemudian setelah mendapatkan informasi mengenai program inklusif ini , peneliti melanjutkan wawancara ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan kemudian dihubungkan dengan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Layanan Inklusif Kabupaten Semarang.

1.8.7. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Data-data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data selanjutnya disusun untuk kemudian disajikan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang teknik analisisnya dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena yang sedang diteliti dengan kata-kata atau kalimat sesuai keterangan dari pihak-pihak yang ada didalamnya. Hasil dari kegiatan ini kemudian diinterpretasikan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Ada teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) yang penulis gunakan, yaitu :

1. Reduksi Data

Tahap ini adalah tahap dimana data direduksi untuk memberikan hasil yang lebih tajam dengan memilah hasil penelitian berdasarkan hal pokok yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Reduksi data juga dapat membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu . Tahapan reduksi tersebut kemudian dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Identifikasi satuan (unit). Sebelumnya identifikasikan adanya satuan seperti bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna jika dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
2. Membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan agar tetap dapat ditelusuri data atau satuannya berasal dari sumber mana.

2. Display Data

Pengertian Display Data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau grafik, network dan sebagainya. Display data ini merupakan salah satu dari teknik teknik analisis data. Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan display data. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

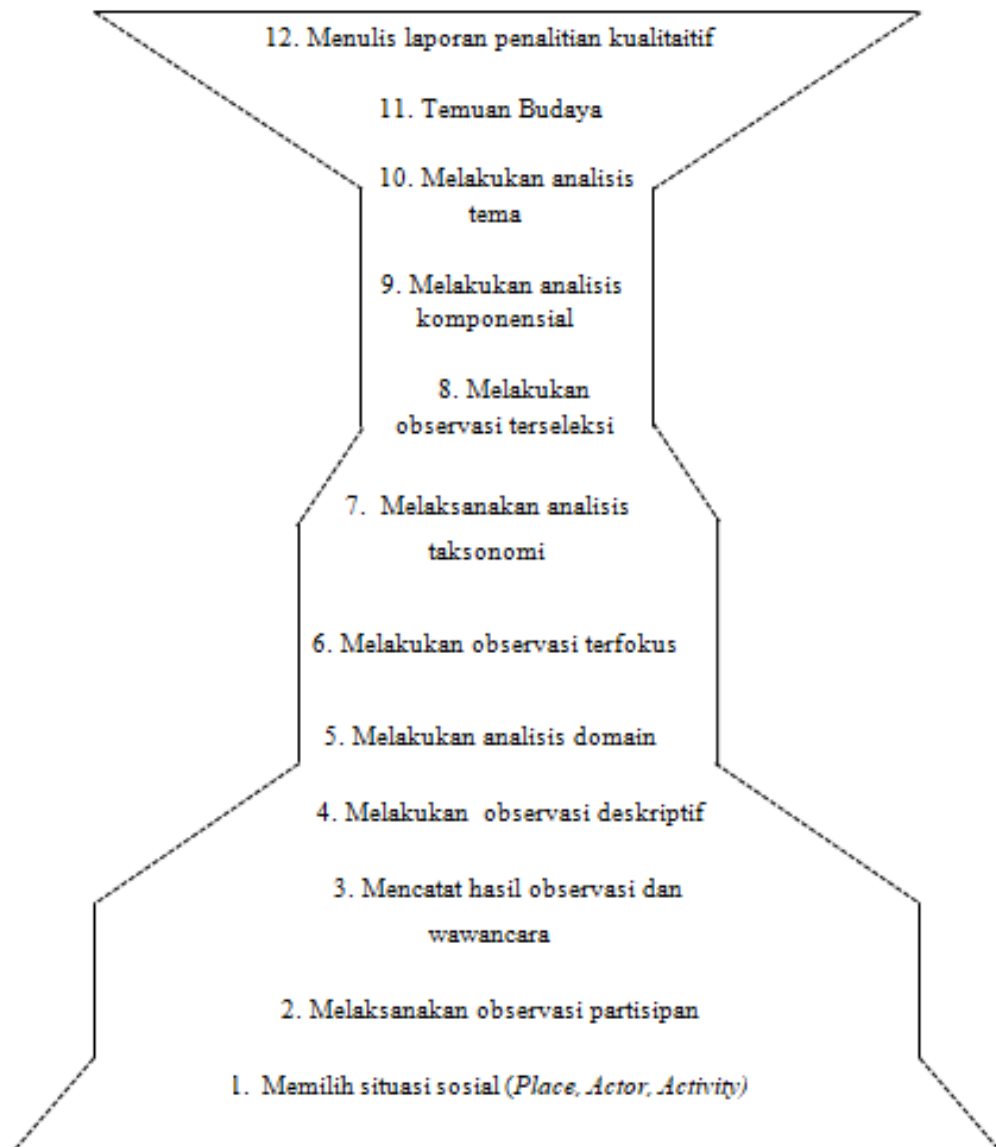
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi ialah salah satu dari teknik teknik analisis data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik itu dari segi makna maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Makna yang dirumuskan dari data harus diuji terlebih dahulu mengenai kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, peneliti tersebut harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata key informan dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pendekatan etik).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

Analisis data selama dilapangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Spradley. Spradley (1980) dalam Sugiyono (2016, pp. 345–362) membagi analisis data dalam berbagai tahapan sebagai berikut pada gambar 1.7.

Gambar 1. 7.
Tipe Penelitian Kualitatif menurut Spradley



Sumber.: Sugiyono (2016:346)

Analisis data selama di lapangan pada penelitian ini dibagi dalam beberapa langkah sesuai dengan Gambar 1.7 Penelitian ini dimulai dari memilih situasi sosial; yang dilanjutkan dengan melaksanakan observasi partisipan; selanjutnya mencatat hasil observasi dan wawancara; dilanjutkan dengan melakukan observasi deskriptif, kemudian melakukan analisis domain; yang dilanjutkan dengan

melakukan observasi terfokus; kemudian melaksanakan analisis taksonomi dan melakukan observasi terseleksi dan selanjutnya melakukan analisis komponensial.

1.8.8 Keabsahan/ Validitas Data

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan yang lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2014:274) terdapat tiga macam pemeriksaan teknik triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara yang kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu sering mempengaruhi data, karena data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada waktu pagi hari sehingga narasumber masih segar.

Adapun dalam penelitian tentang Manajemen Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar dalam Perspektif Proses Intervensi Sosial Di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang ini menggunakan triangulasi sumber. Sebab dalam penelitian ini peneliti melakukan validasi data dengan cara membandingkan dan mencocokkan pendapat antara narasumber satu dengan lainnya yang dilakukan pada saat wawancara agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi keabsahannya.

